



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

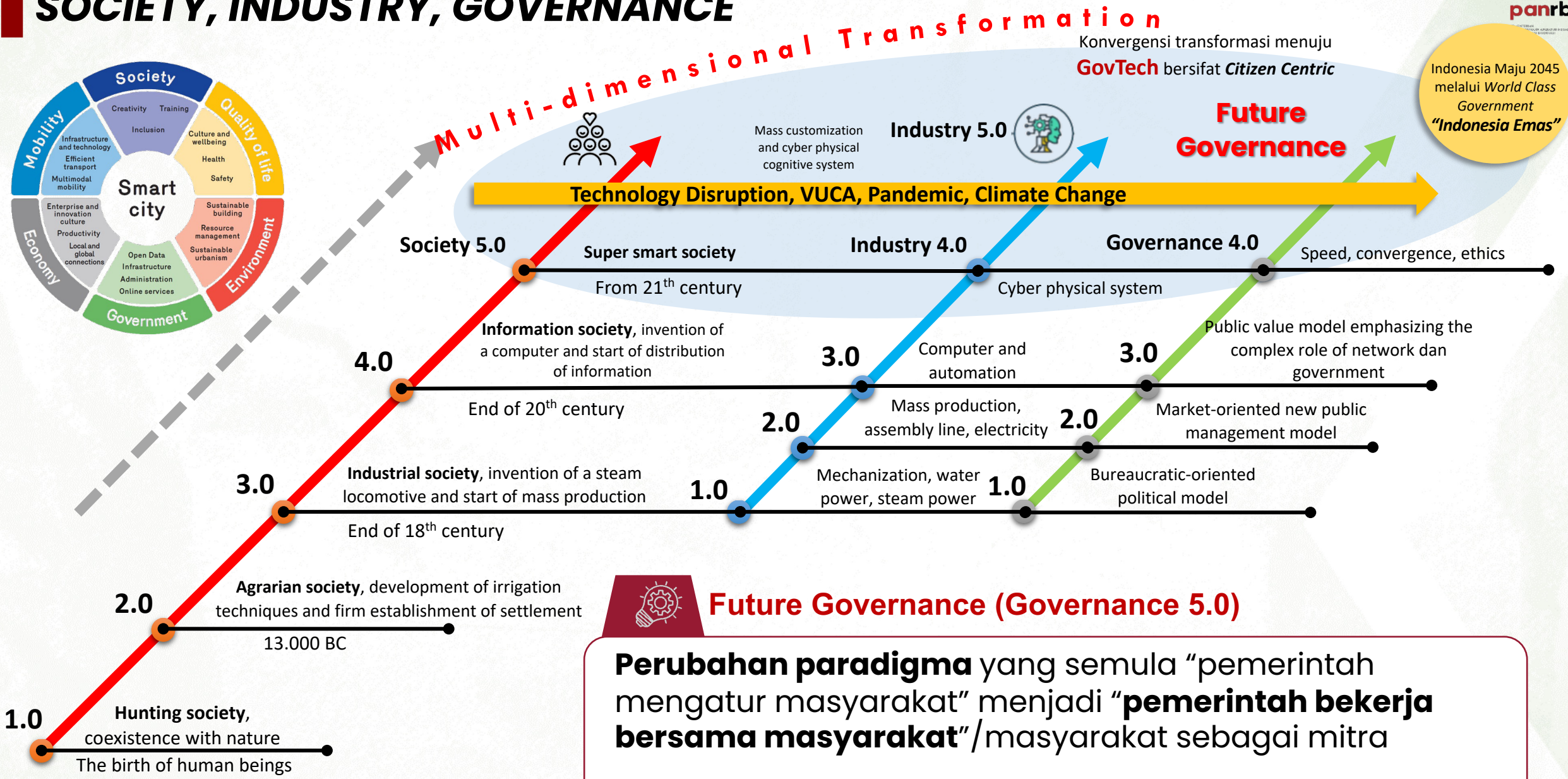
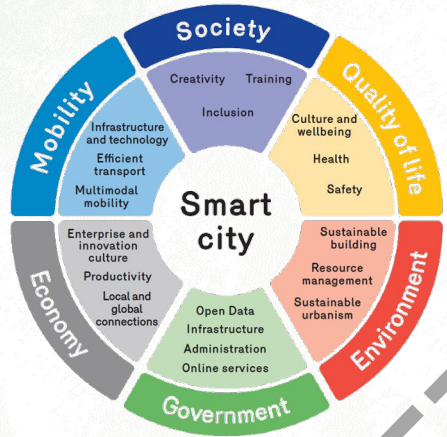
# BERGERAK **UNTUK** **REFORMASI BIROKRASI** **BERDAMPAK**

## PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL



**#** bangga  
melayani  
bangsa

# TREN PERUBAHAN PARADIGMA SOCIETY, INDUSTRY, GOVERNANCE



**Future Governance (Governance 5.0)**

**Perubahan paradigma** yang semula "pemerintah mengatur masyarakat" menjadi "**pemerintah bekerja bersama masyarakat**" / masyarakat sebagai mitra  
(a mindset shift: "from governing for citizens to governing with citizens")



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132 TAHUN 2022

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);  
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

2. Arsitektur . . .



# Perpres Arsitektur SPBE Telah Ditandatangani Bapak Presiden Joko Widodo

Bukti komitmen pemerintah mengakselerasi implementasi integrasi proses bisnis, data & informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE & keamanan SPBE untuk Pencegahan korupsi & peningkatan kualitas pelayanan publik

# ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI BIROKRASI 2024

## REFORMASI BIROKRASI BERDAMPAK

### TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN

#### RB PENANGGULANGAN KEMISKINAN



1. Penajaman tata kelola perencanaan strategis serta program kegiatan berbasis dampak pada K/L/D
2. Mendorong *joint outcomes* lintas Instansi Pemerintah
3. Reformulasi kebijakan/program pengentasan kemiskinan

#### RB PENINGKATAN INVESTASI



1. Penataan proses bisnis sektor perizinan lintas K/L/D
2. Reformulasi kebijakan/program peningkatan investasi

#### RB PERCEPATAN PRIORITAS AKTUAL PRESIDEN



Penguatan tata kelola birokrasi merespons hal-hal mendesak sesuai arahan Presiden



**Arsitektur SPBE  
Menopang  
RB Tematik**

#### RB DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN



1. Keterpaduan Layanan Digital
2. Integrasi dan validasi Data
3. Distribusi Digital talent (Talenta Digital)



# TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK

## PEMANFAATAN DIGITAL ID BERBASIS DATA KEPENDUDUKAN

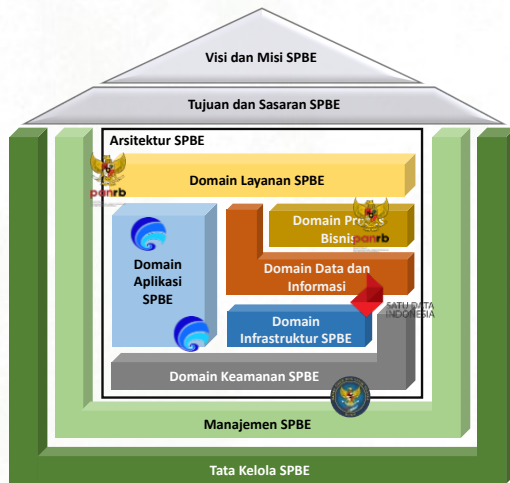


Arsitektur SPBE Nasional sudah dan akan terus disesuaikan untuk **mengadopsi konsep DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE (DPI)**, yaitu **tren pemerintahan digital di dunia yang fokus ke 3 sistem dasar (identitas digital, platform pertukaran data, dan pembayaran digital)** sebagai fondasi pemerintahan digital. Saat ini juga bahkan sudah ada **piagam PBB khusus untuk DPI**

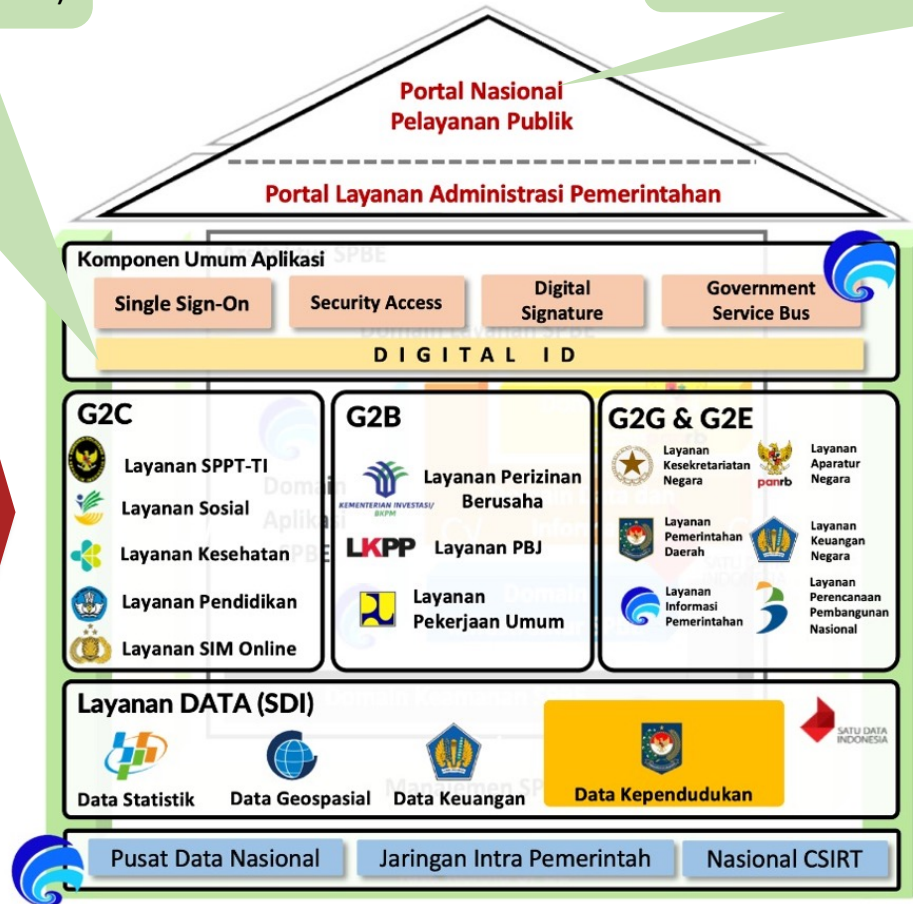


Berbasis data kependudukan  
(UU 24/2013 Administrasi Kependudukan)

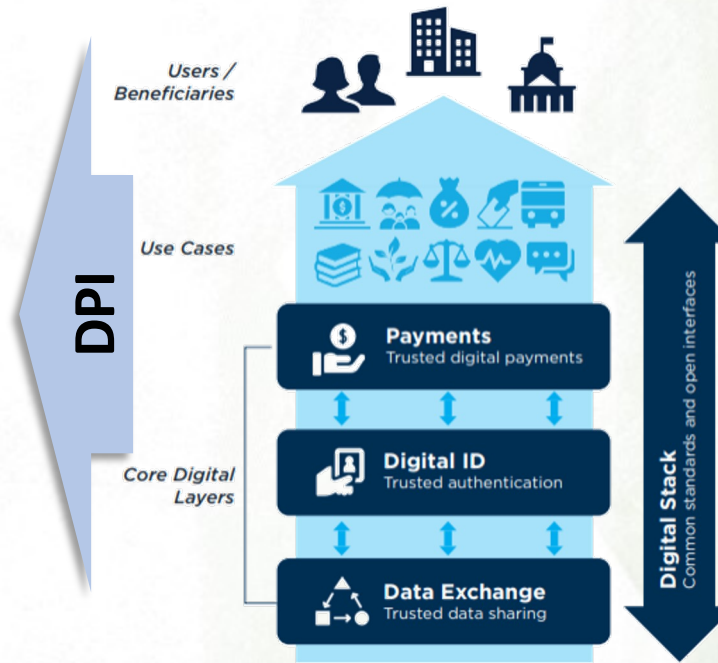
Portal Nasional Pelayanan Publik akan mendukung dalam program **MPP-Digital**



**Inisiatif Strategis 2024**

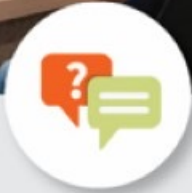


### Digital Public Infrastructure (DPI)



Melalui arsitektur SPBE, tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru, tetapi memastikan **interoperabilitas antar aplikasi existing** menjadi layanan digital pemerintah yang terpadu (**berupa platform digital nasional, dengan mengintegrasikan e-services berbagai instansi**)

# 4 Ekosistem Pelayanan Terintegrasi: Ditargetkan di 150 Kab/Kota pada 2024



## Direct Services (Pelayanan Langsung)

Interaktif antara  
pelaksana dan  
penerima pelayanan



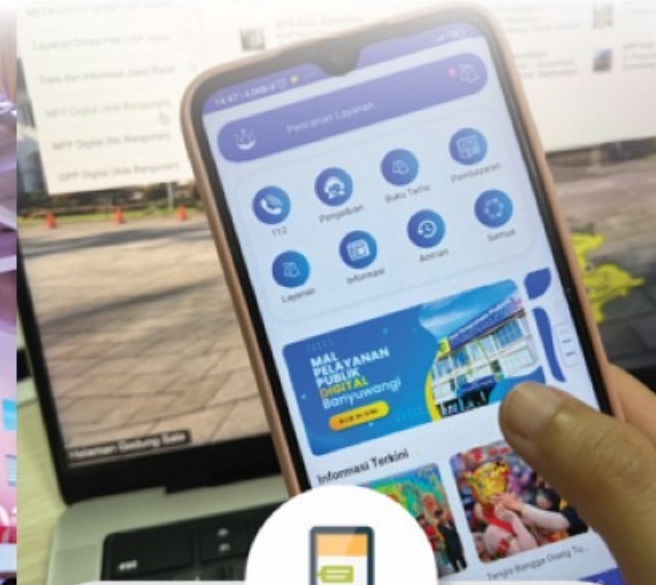
## Mobile Services (Pelayanan Langsung)

Pelayanan bergerak  
menggunakan sarana  
transportasi



## Self Services (Pelayanan Mandiri)

Pelayanan yang  
dilakukan sendiri



## Electronic Services (MPP Digital)

Pelayanan interaktif  
menggunakan  
teknologi informasi

# MPP DIGITAL



MPP Digital dibangun sebagai wujud percepatan integrasi pelayanan publik berbasis elektronik (*e-services*) sebagai dukungan penyelenggaraan pada MPP Fisik

## DAMPAK

MPP Digital menghadirkan penyelenggaraan pelayanan yang **efektif & efisien**

### SEBELUM

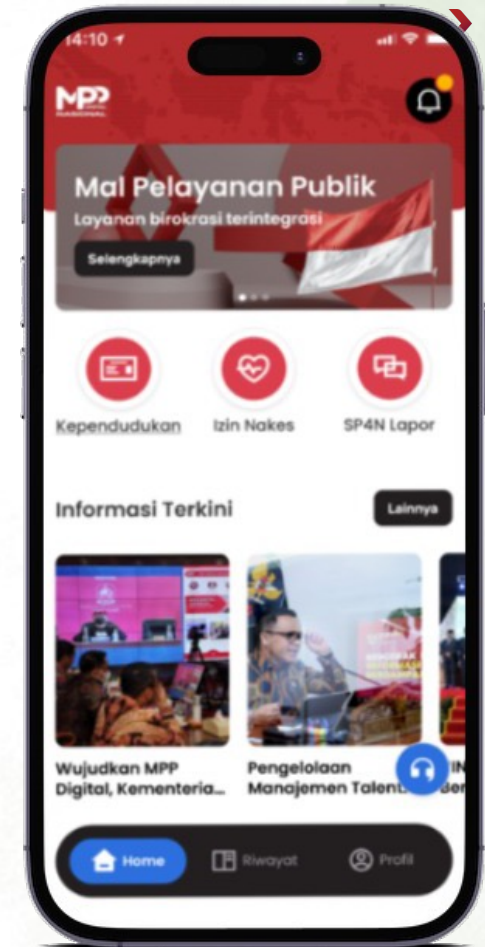
- ✗ Masyarakat mengisi data berulang-ulang
- ✗ Masyarakat harus membuat banyak akun di berbagai aplikasi pemerintah (*e-services*)
- ✗ Masyarakat harus datang langsung ke lokasi untuk mengakses layanan

### SESUDAH

- ✓ Masyarakat hanya cukup sekali *input data*
- ✓ Masyarakat hanya butuh 1 akun untuk berbagai *e-services*
- ✓ Layanan bisa diakses dimanapun, kapanpun, melalui berbagai perangkat elektronik

## PROGRESS

- ✓ Analisis layanan awal di MPP Digital
- ✓ Penyusunan proses bisnis dan pengembangan desain aplikasi
- ✓ Pengembangan infrastruktur aplikasi
- ✓ Integrasi layanan
- ✓ Pengujian keamanan dan performa aplikasi



## STRATEGI KE DEPAN

1. Standardisasi integrasi layanan instansi pemerintah yang akan terhubung di MPP Digital.
2. Penguatan keamanan aplikasi, infrastruktur, dan data.

## LAYANAN TAHAP AWAL



Kependudukan



Izin Kesehatan

Secara umum aplikasi sudah diterapkan di 21 Kabupaten/Kota dan siap diluncurkan meskipun masih perlu beberapa perbaikan minor

MPP Digital merupakan hasil kerja sama dari:





# PENERAPAN ENTERPRISE ARCHITECTURE INTERNATIONAL BENCHMARK

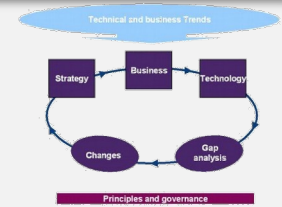


**Denmark**

Indeks EGD  
#1 untuk tahun 2018, 2020, & 2022

Danish Government Enterprise Architecture Framework - *Offentlig Information Online*  
*Enterprisearkitektur (OIO EA)* - 2003

Portal pelayanan publik terpadu (**borger.dk**)  
**Digital ID - MitID**

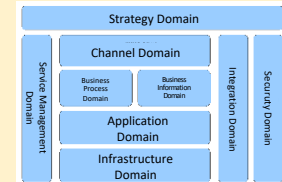


**Inggris**

Indeks EGD  
#1 untuk tahun 2016

The cross-Government Enterprise Architecture (xGEA), 2005

Portal pelayanan publik terpadu (**gov.uk**)  
**Digital ID - Gov.UK One Login**

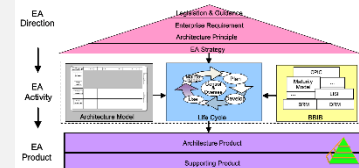


**Korea Selatan**

Indeks EGD  
#1 untuk tahun 2010, 2012, & 2014

Government-wide Enterprise Architecture Framework (GEAF) - 1999

Portal pelayanan publik terpadu (**gov.kr**)  
**Digital ID - Mobile ID Card**

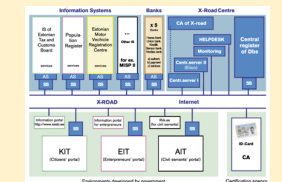


**Estonia**

Indeks EGD  
#8 untuk tahun 2022, index 0,93

Estonia E-Government Architecture (X-Road)- 1997

Portal pelayanan publik terpadu (**eesti.ee**)  
**Digital ID - eID**

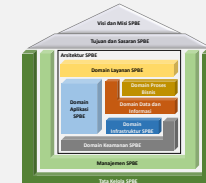


**Indonesia**

**idEA**  
Indonesia Enterprise Architecture

Arsitektur SPBE Nasional 2022 (Perpres 132/2022)

Portal pelayanan publik terpadu (**MPP-Digital**)  
**Indonesia Digital ID**





# 4 Agenda hari ini, **Percepatan Transformasi Digital** untuk Keterpaduan Layanan Digital Nasional

01



**Pembelajaran dari Kunjungan KemenPANRB ke Inggris dan Estonia**, untuk mengakselerasi transformasi digital pemerintahan

02



**Fondasi Digital Government di Indonesia** sudah ada namun kualitas dan kecepatan implementasi harus ditingkatkan dengan mengadopsi praktik terbaik (*best practices*) di dunia

03



**Inisiatif penugasan Perum Peruri untuk penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas melalui Perpres** Percepatan Transformasi Digital untuk Keterpaduan Layanan Digital Nasional

04



**Roadmap pencapaian layanan digital nasional telah dibuat** untuk memastikan dampak dan implementasi Perpres

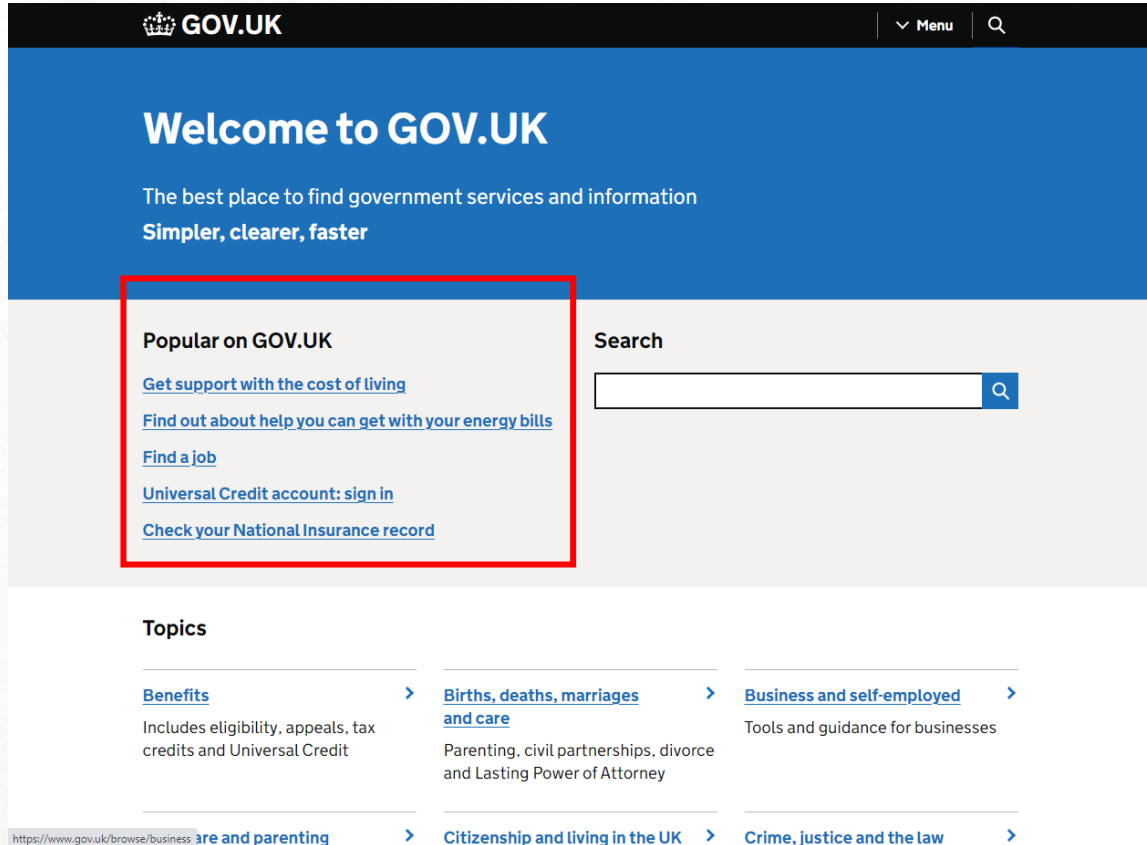


Arah **transformasi digital Indonesia sudah berada di arah yang tepat**, sebagaimana juga yang dilakukan di Inggris dan Estonia serta beberapa negara di awal prosesnya. Namun, masih **perlu akselerasi dan dukungan kerangka regulasi yang kuat**.

FOKUS	 <b>INGGRIS</b>	 <b>ESTONIA</b>
<p>Inggris fokus ke <b>kepuasan masyarakat</b>, Estonia fokus ke <b>kemudahan administrasi</b></p>	<p><b>KISAH SUKSES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Konsolidasi +2.000 website</b> menjadi <b>1 portal</b></li> <li>• <b>Platform Gov.UK</b> diadopsi negara lainnya</li> <li>• <b>Konsisten peringkat 10 teratas</b> UN E-Gov Index</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PDB per kapita meningkat 10x lipat</b> (\$2800 to \$28.000) dalam <b>20 tahun</b> terakhir, vs Indonesia yang <b>6.5x</b></li> <li>• <b>99% layanan publik sudah digital</b></li> <li>• <b>Platform X-Road</b> diadopsi di 20+ negara</li> <li>• <b>Konsisten peringkat 10 teratas</b> UN E-Gov Index</li> </ul>
<p><b>Lembaga Terpusat</b> untuk koordinasi strategi, kebijakan, dan implementasi</p>	<p><b>KELEMBAGAAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Central Digital and Data Office (CDDO)</b> di bawah Kantor Perdana Menteri untuk penyusunan strategi dan kebijakan;</li> <li>• <b>Government Digital Services (GDS)</b> di bawah Kantor Perdana Menteri untuk pengembangan dan implementasi sistem utama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Government CIO Office Estonia</b>, untuk penyusunan kebijakan dan strategi;</li> <li>• <b>Otoritas Sistem Informasi (RIA)</b>, untuk pengembangan pengelolaan dan implementasi, termasuk bekerja sama dengan swasta dengan mekanisme KPBU (jika dibutuhkan)</li> </ul>
<p><b>1 portal</b> untuk seluruh layanan publik, berbasis identitas digital</p>	<p><b>LAYANAN DIGITAL UTAMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gov.UK</b> (portal layanan publik terintegrasi)</li> <li>• <b>Konsolidasi +7700 layanan</b> dalam <b>1 portal, one login</b> melalui <b>Digital Identity</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eesti.ee</b> (portal layanan publik terintegrasi),</li> <li>• <b>Konsolidasi 500+ layanan</b> dalam <b>1 portal, one login</b> melalui <b>Digital Identity</b></li> </ul>
<p><b>Fokus ke DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE</b></p>	<p><b>SISTEM UTAMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gov.UK One Login</b> (identitas digital);</li> <li>• <b>Gov.UK Pay</b> (pembayaran digital);</li> <li>• <b>Gov.UK Notify</b>;</li> <li>• <b>Gov.UK Forms</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>e-ID/Digital ID/Mobile ID</b> (identitas digital);</li> <li>• <b>X-Road</b> (platform pertukaran data)</li> <li>• <b>Digital Healthcare</b> (platform layanan kesehatan)</li> <li>• <b>Digital Business</b> (platform layanan dunia usaha)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Political Will</b></li> <li>- <b>Rekrutmen talenta</b></li> <li>- <b>Fokus ke DPI</b></li> <li>- <b>Literasi Digital</b></li> <li>- <b>Fokus Pengguna</b></li> <li>- <b>Keamanan Informasi</b></li> </ul>	<p><b>FAKTOR SUKSES KUNCI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kemauan politik/kepemimpinan</b> untuk mensentralisasi koordinasi secara konkret;</li> <li>• <b>Rekrutmen talenta digital swasta</b> ke dalam lingkungan pemerintahan untuk membangun kemampuan eksekusi/implementasi;</li> <li>• <b>Fokus kepada kebutuhan pengguna</b> (<i>Citizen Centric</i>)</li> <li>• <b>Keamanan informasi</b> dan jaminan <b>keberlangsungan layanan</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Revolusi Digital</b> dengan kepemimpinan digital yang kuat di seluruh lini pemerintahan</li> <li>• <b>Fokus ke sistem-sistem utama</b> (identitas digital, platform pertukaran data, pembayaran digital, layanan dasar, dan layanan dunia usaha);</li> <li>• <b>Literasi/pemahaman digital</b> baik masyarakat dan terutama internal ASN di berbagai level</li> <li>• <b>Digital Trust</b> dan <b>Cyber Security</b></li> </ul>

# Portal Layanan Publik Inggris & Estonia

Website menampilkan langsung kebutuhan rakyat, tidak berdasarkan perspektif instansi (*Citizen Centric*).  
 Di Inggris contoh langsung ada link: **Bagaimana mendapatkan bansos, bagaimana melihat riwayat asuransi pemerintah, bagaimana mendapatkan kerja, dll.** Di Estonia ada link : **bagaimana saat saya sakit, bagaimana saat akan mempunyai anak, bagaimana saat akan menikah, bagaimana mengganti data alamat, dll.**

**GOV.UK** Menu

## Welcome to GOV.UK

The best place to find government services and information  
 Simpler, clearer, faster

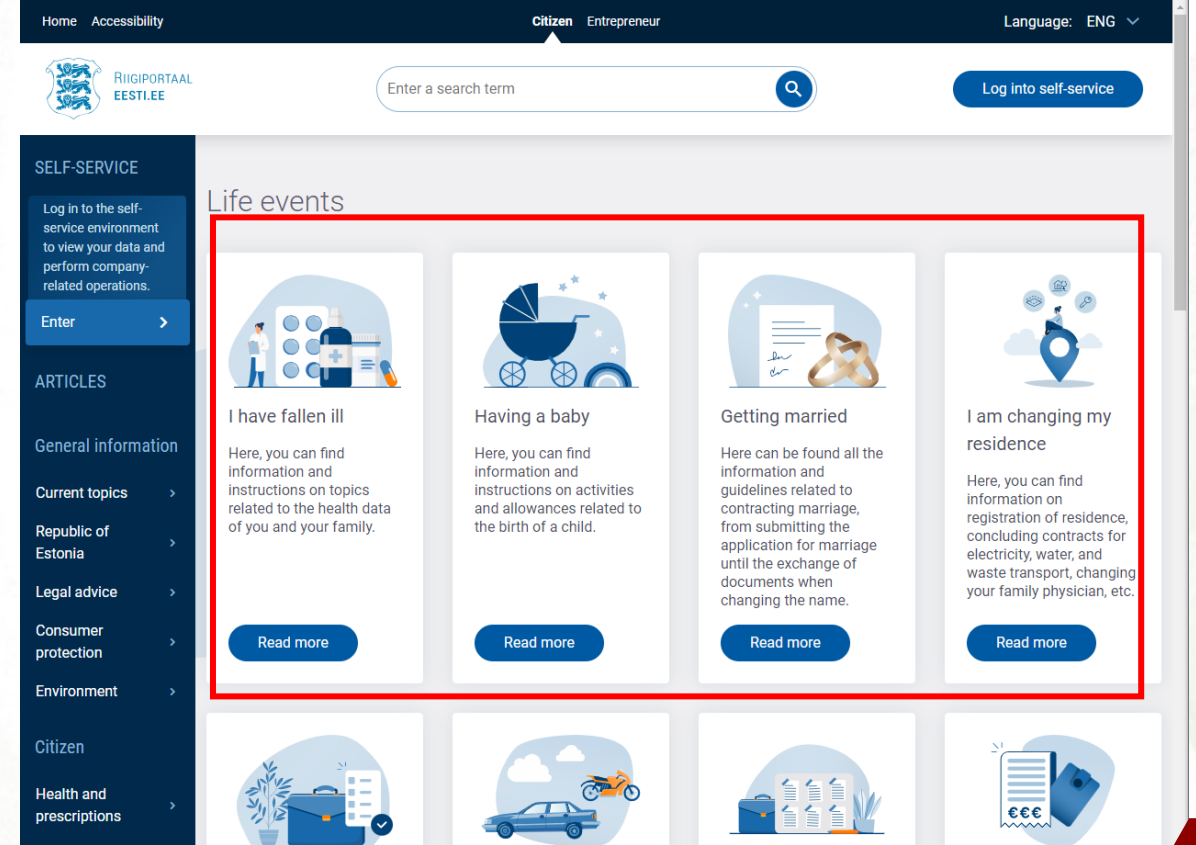
**Popular on GOV.UK**

- [Get support with the cost of living](#)
- [Find out about help you can get with your energy bills](#)
- [Find a job](#)
- [Universal Credit account: sign in](#)
- [Check your National Insurance record](#)

Search

**Topics**

- [Benefits](#) > Includes eligibility, appeals, tax credits and Universal Credit
- [Births, deaths, marriages and care](#) > Parenting, civil partnerships, divorce and Lasting Power of Attorney
- [Business and self-employed](#) > Tools and guidance for businesses
- [Citizenship and living in the UK](#) >
- [Crime, justice and the law](#) >



Home Accessibility Citizen Entrepreneur Language: ENG

RIIGIPORTAAL EESTILEE

Enter a search term

Log into self-service

**SELF-SERVICE**

Log in to the self-service environment to view your data and perform company-related operations.

Enter >

**ARTICLES**

General information >

Current topics >

Republic of Estonia >

Legal advice >

Consumer protection >

Environment >

Citizen

Health and prescriptions >

**Life events**

- I have fallen ill**  
 Here, you can find information and instructions on topics related to the health data of you and your family.  
[Read more](#)
- Having a baby**  
 Here, you can find information and instructions on activities and allowances related to the birth of a child.  
[Read more](#)
- Getting married**  
 Here can be found all the information and guidelines related to contracting marriage, from submitting the application for marriage until the exchange of documents when changing the name.  
[Read more](#)
- I am changing my residence**  
 Here, you can find information on registration of residence, concluding contracts for electricity, water, and waste transport, changing your family physician, etc.  
[Read more](#)

# Indonesia Saat Ini dan *Best Practice*

Diperlukan **terobosan** agar Indonesia dapat mewujudkan potensi **Pemerintah Digital** secara **maksimal**

## FOKUS

Koordinasi Strategi dan Kebijakan telah dilaksanakan Tim Koordinasi SPBE dan Kemenko, namun **masih diperlukan adanya pengelola terpusat untuk implementasi teknis**

Perlu ditentukan bahwa **hanya ada 1 portal untuk seluruh layanan publik**, berbasiskan identitas digital

Indonesia perlu **fokus ke DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE (DPI) sebagai dasar** dimana layanan lain akan dibangun

- **Political Will**
- **Kepemimpinan digital**
- **Rekrutmen talenta**
- **Prioritas ke DPI**
- **Sentralisasi lembaga**
- **Fokus Pengguna**

## KELEMBAGAAN



## LAYANAN DIGITAL UTAMA



## SISTEM UTAMA



## FAKTOR SUKSES KUNCI



- Strategi dan Kebijakan oleh **Tim Koordinasi SPBE Nasional (7 Instansi) Kementerian Koordinator**
- **Tidak ada institusi/lembaga khusus** untuk pengembangan dan implementasi layanan digital nasional (pembangunan sektoral)



- **Terpisah dan tidak terintegrasi** (bersifat sektoral dan *government centric*)
- **Direncanakan** akan ada Portal Pelayanan Publik Nasional dan Super-App dengan beberapa layanan sebagai pilot, **berbasis Arsitektur SPBE Nasional**

- Database NIK masih **terbatas pada fungsi verifikasi dan validasi identitas**
- Sebatas portal data terpadu, **belum ada kapabilitas sebagai platform pertukaran data nasional**
- Sudah ada sistem Kemenkeu (MPN) dan BI (QRIS, BI-FAST), serta rencana pengembangan sistem transaksi keuangan negara kepada masyarakat (*Government to Person/G2P*), **namun belum terkonsolidasi**

- **Kemauan dan dukungan politik**
- **Kepemimpinan digital**
- Fokus ke pengguna (**Citizen Centric**)
- Penguatan/**sentralisasi tata kelola** dan kelembagaan
- Rekrutmen **talenta digital terbaik** ke pemerintahan
- Prioritisasi **Digital Public Infrastructure** dan **interoperabilitas sistem eksisting**

## INDONESIA



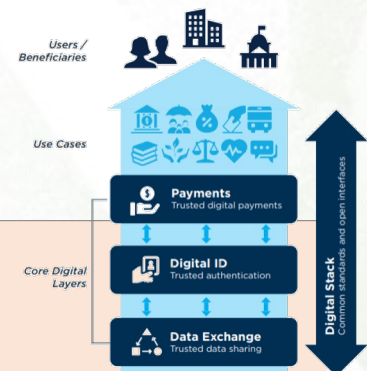
## BEST PRACTICE

- **Lembaga khusus dan sentral** untuk memimpin strategi dan kebijakan
- **Lembaga khusus dan sentral** untuk eksekusi pengembangan dan implementasi

## GovTech

- **Layanan terpadu secara nasional** (lintas sektor dan citizen centric)
- **1 Portal** dan/atau **app utama pemerintah** dengan **layanan publik terintegrasi, berbasis identitas digital nasional** sehingga membutuhkan **hanya satu akun (single sign-on)** untuk seluruh layanan

- **3 sistem utama dikelola pemerintah sebagai dasar pemerintahan digital (Digital Public Infrastructure Framework)**
  1. Identitas digital nasional
  2. Platform pertukaran data
  3. Pembayaran digital



# Inisiatif Perpres Percepatan Transformasi Digital untuk Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Perpres Percepatan Transformasi Digital dirancang dengan membawa semangat Perpres SPBE dan Satu Data, mempedomani Arsitektur SPBE Nasional, untuk **membawa dampak aktual peningkatan kepuasan masyarakat, daya saing ekonomi digital, dan capaian indeks global pemerintahan digital.**



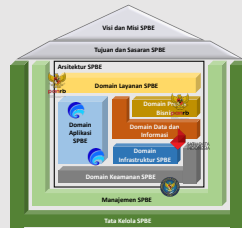
**Perpres SPBE:**  
Prinsip keterpaduan melalui pelaksanaan Arsitektur SPBE

**Perpres Satu Data Indonesia:**  
Manajemen data SPBE dan Domain Data dan Informasi Arsitektur SPBE



SATU DATA INDONESIA

## Arsitektur SPBE Nasional



- 1 Arsitektur SPBE Nasional
- 2 Target Inisiatif Strategis 2024

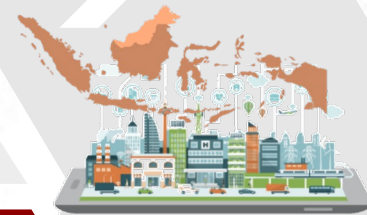
- Peran Kementerian Koordinator
- Peran Tim Koordinasi SPBE Nasional

## Rancangan Perpres



**"Percepatan Transformasi Digital untuk Mencapai Keterpaduan Layanan Digital Nasional"**

- Penugasan Perum Peruri sebagai GovTech Indonesia
- Klausula Pengakhiran/Terminasi Aplikasi untuk Efektifitas dan Efisiensi
- Fokus 9 aplikasi prioritas TW 3 2024
- Penganggaran dan pendanaan



Peningkatan **kepuasan masyarakat dan daya saing ekonomi digital**

**AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAHAN INDONESIA**



Peningkatan **capaian indeks global pemerintahan digital**

# Isu-Isu Strategis SPBE di Rancangan Perpres

Perpres dirancang agar mampu menjawab isu-isu strategis SPBE yang selama ini menghambat implementasi dan akselerasi *progress*



## Kapabilitas Implementasi Layanan Digital

Saat ini pengembangan sistem dan layanan digital **dikerjakan oleh vendor dengan kemampuan yang tidak terstandar**

**Penugasan PERUM PERURI** sebagai *National digital solution provider*, pengembang, dan penyelenggara Aplikasi SPBE Prioritas



## Koordinasi Penerapan SPBE Antar Lembaga

Saat ini mekanisme **koordinasi K/L/D masih terfragmentasi** dan pemahaman atas implementasi SPBE **belum seragam dan sejalan**

**Penguatan Peran Kemenko dan Tim Koordinasi SPBE Nasional** dalam koordinasi kebijakan dan pencapaian target



## Kepastian Hukum Efisiensi Aplikasi Digital

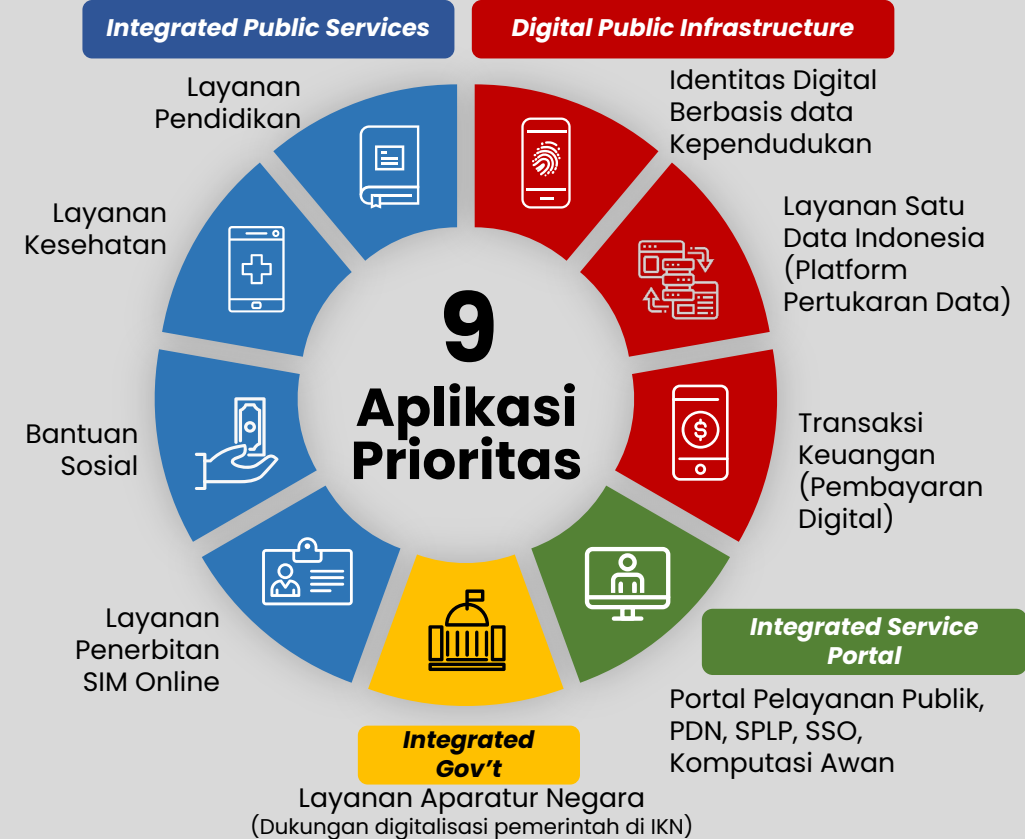
Saat ini **efisiensi dan efektivitas** integrasi 27 ribu aplikasi pemerintah **sulit dilakukan, belum ada perlindungan** untuk terminasi aplikasi

Pemberian **kewenangan** untuk melakukan **terminasi aplikasi tanpa dianggap kerugian negara**



## Fokus Aplikasi SPBE Prioritas

diluncurkan di TW 3 2024



### Kriteria lainnya:

- Aplikasi dengan anggaran lebih dari 10 Milyar Rupiah/tahun
- Aplikasi memiliki lebih dari 200.000 pengguna

TANTANGAN

SOLUSI

**Dukungan Penganggaran dan Pendanaan**

# NEXT LEVEL FASE PEMERINTAHAN DIGITAL



**id.EA**  
(Indonesia Enterprise Architecture)

Melalui pemanfaatan **Arsitektur SPBE**, pemerintah Indonesia dapat melompat fase digitalisasi administrasi pemerintahan, menuju fase **GovTech**

**Analog Government**

## e-Government

1. Layanan berbasis user & penyediaan oleh instansi
2. Layanan berbasis elektronik, masih terdapat kegiatan fisik
3. Interoperabilitas Sistem Informasi

## Digital Government

1. Desain prosedur layanan berbasis digital
2. Layanan bersifat citizen centric
3. Data-driven policy
4. Proaktif layanan administrasi pemerintah

## GovTech

1. Layanan inklusif berbasis Citizen Centric, **berbasis outcome**
2. Implementasi Transformasi Digital secara Nasional (**Government-Wide**)
3. Sistem Pemerintah yang **sederhana, efisien & transparan**

**Fase digitalisasi Indonesia**



**Indonesia**  
**@palm\_ur\_hand**

# ISU DAN TANTANGAN TATA KELOLA PENERAPAN e-GOVERNMENT DI INDONESIA

Pengembangan E-Government untuk peningkatan efisiensi, efektivitas, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui INPRES NO. 3/2003



Tim Koordinasi SPBE Nasional

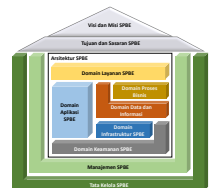


KETERPADUAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN MELALUI SPBE

Pembangunan aplikasi di Instansi juga didasarkan pada amanat peraturan perundangan (sektoral)



Perpres 95/2018 "Penerapan prinsip keterpaduan SPBE, melalui penerapan Arsitekur SPBE"



- Pembangunan Digital Ekosistem identik dengan pembangunan TIK (aplikasi dan infrastruktur)
- Pembangunan TIK bersifat sektoral di internal instansi dan antar instansi pemerintah sesuai dengan mandat UU



# TREN PERKEMBANGAN DIGITALISASI

it

Information Technology

+

3C

Communicate  
Coordinate  
Collaborate\*

\*Ellis, Gibbs, and Rein (1991)

=

ICT

Information and Communication Technology

Inpres 3/2003 e-Government

Era penerapan masih bersifat sektoral untuk **menumbuhkembangkan pemanfaatan digital pada setiap instansi**, sehingga efektif terjadi **pembangunan aplikasi pada setiap instansi**. Pada masa tersebut penggunaan teknologi internet masih belum bersifat masif

2018 SPBE + 2019 SDI

Dampak konvergensi teknologi antara TI dan perangkat komunikasi yang intens, menjadi **berkembangnya Cloud Computing, Social Media, serta Citizen Centric Digital Services**. Sehingga penerapan layanan digital pemerintah mengutamakan **keterpaduan layanan**

2022 Arsitektur SPBE Nasional

Pembangunan layanan digital pemerintah tidak lagi bersifat sektoral, **bertransformasi menjadi Layanan Digital Nasional**, melalui **pemanfaatan Arsitektur SPBE Nasional (Indonesia Enterprise Architecture – id.EA)**, menuju layanan bersifat *Citizen Centric*

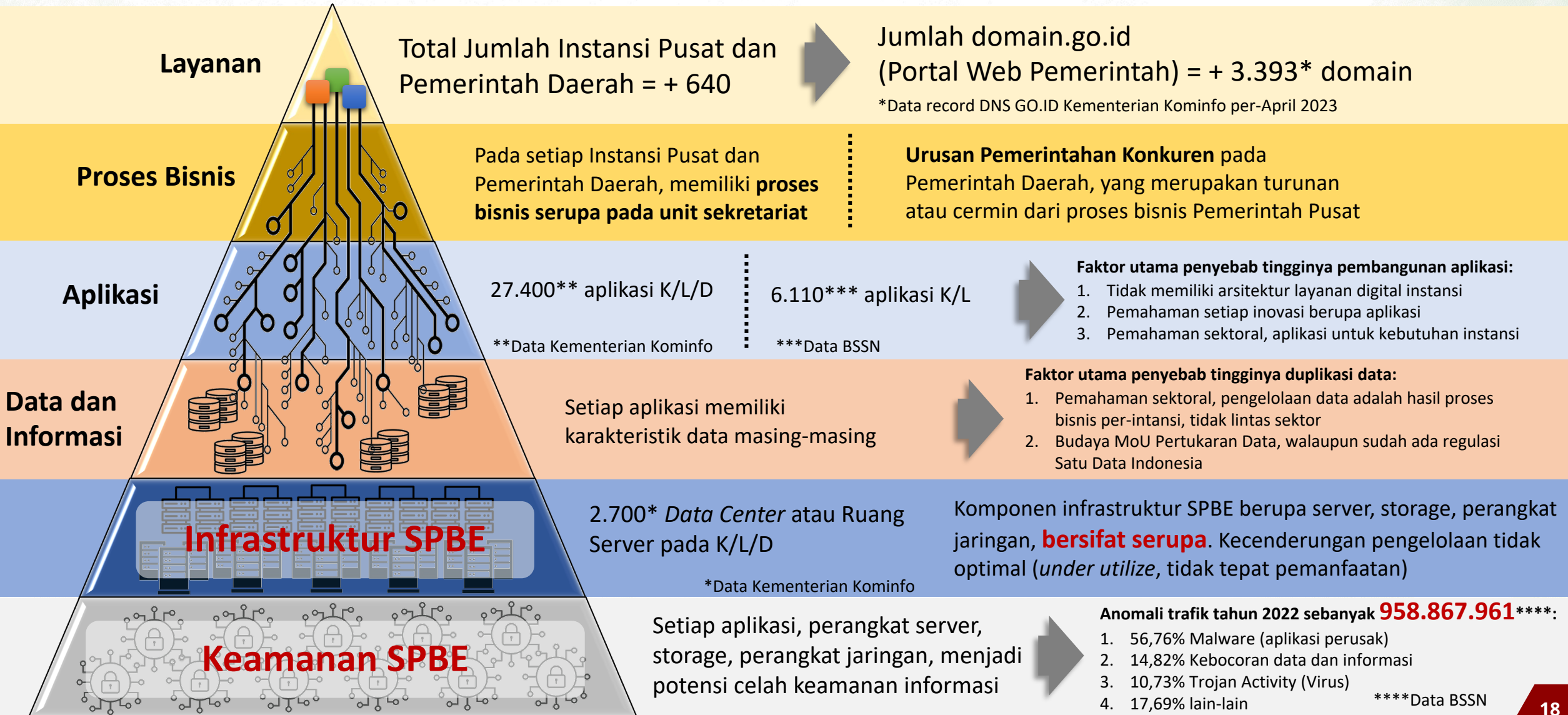
Layanan Digital Sektoral Pemerintah

Transformasi Digital

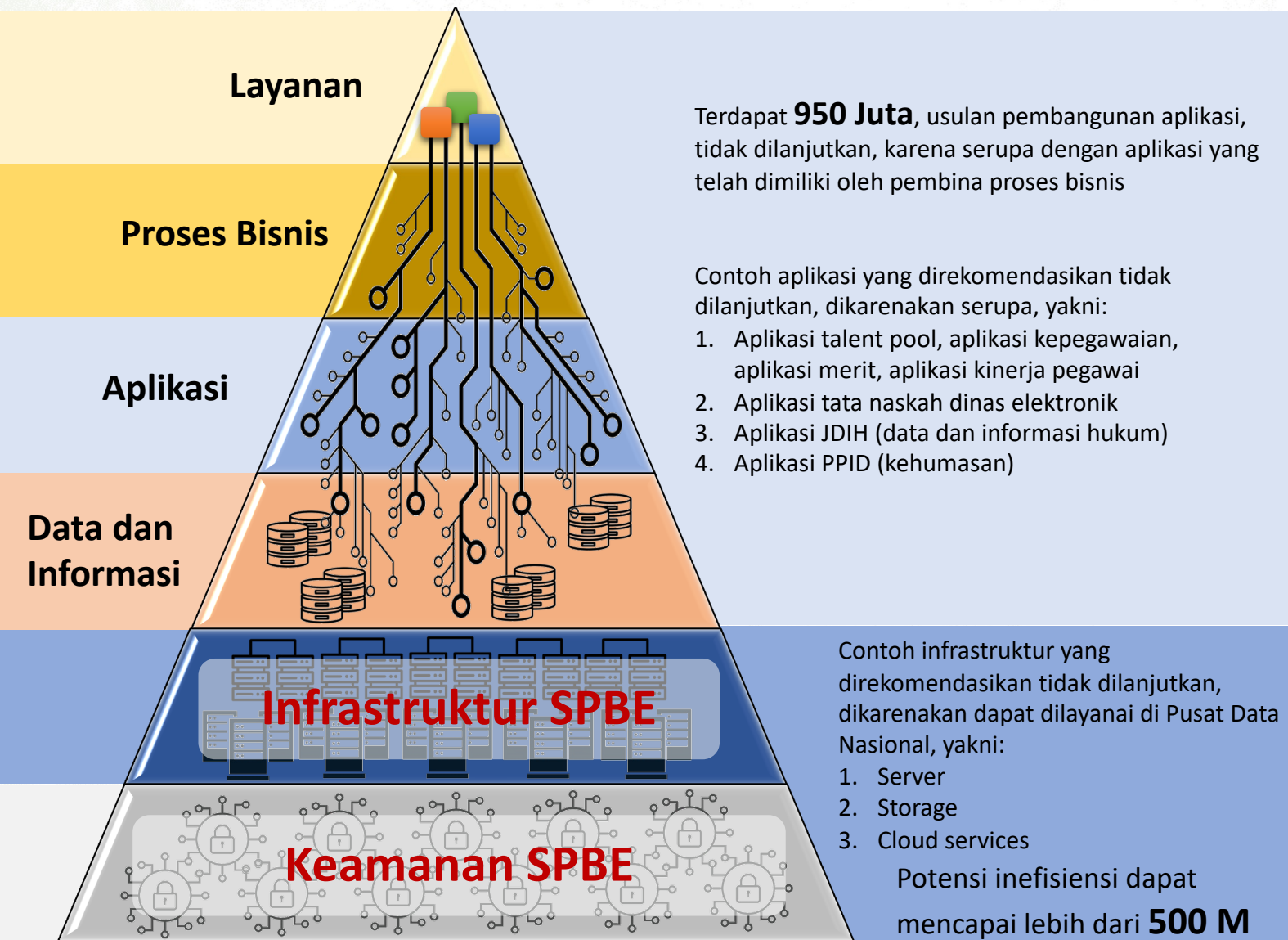
Layanan Digital Nasional

# KONDISI SAAT INI

## DUPLIKASI PADA SETIAP DOMAIN ARSITEKTUR SPBE



# DATA STATISTIK ANGGARAN TIK K/L PADA PROSES PENGAJUAN REKOMENDASI BELANJA TIK T.A. 2023



Rekapitulasi data rekomendasi belanja TIK

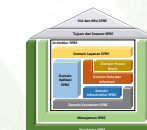
T.A. 2023 per-April 2023:

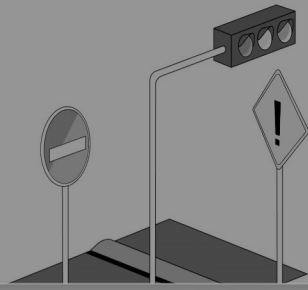
1. Total anggaran yang telah di evaluasi Rp. 5 T, terbagi menjadi belanja:
  - a. aplikasi 49% (2,47 T)
  - b. infrastruktur TIK 51% (2,53 T)
2. Dari total 97 K/L, masih terdapat 57 K/L (59%) belum menyampaikan permintaan rekomendasi belanja TIK, serta terdapat K/L yang tidak menyampaikan seluruh anggaran TIK untuk mendapatkan rekomendasi

**Potensi inefisiensi, masih dapat terus meningkat, dikarenakan:**

1. masih 59% K/L yang belum mengajukan, serta evaluasi belum dilakukan pada Pemerintah Daerah
2. Evaluasi belanja TIK untuk aplikasi, masih bersifat aplikasi secara umum, belum masuk rinci pada fitur aplikasi didalamnya, seperti kemungkinan pemakaian bersama untuk fitur login, email, penyimpanan data, analisis, dll
3. Instansi pemerintah belum secara intensif dan masif menggunakan infrastruktur TIK berbagai pakai,

**Mendorong pemanfaatan Arsitektur SPBE untuk identifikasi rekomendasi belanja TIK**

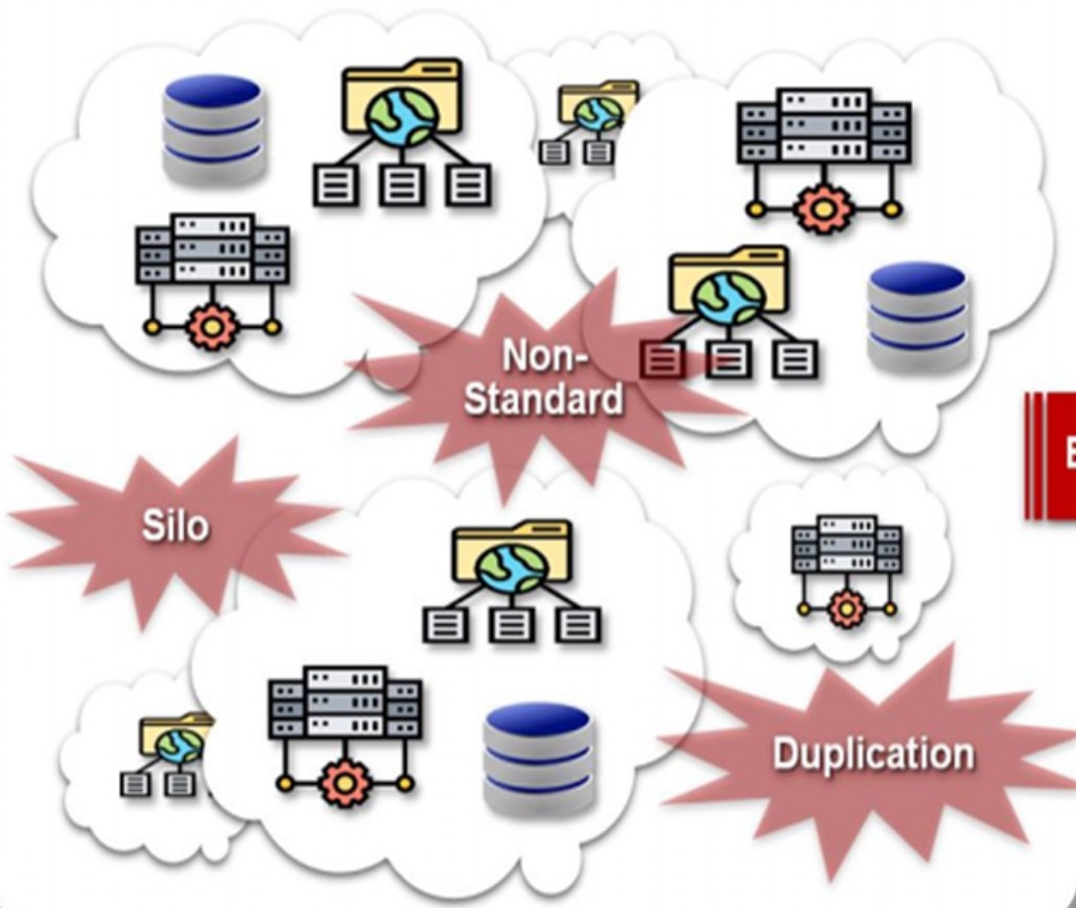




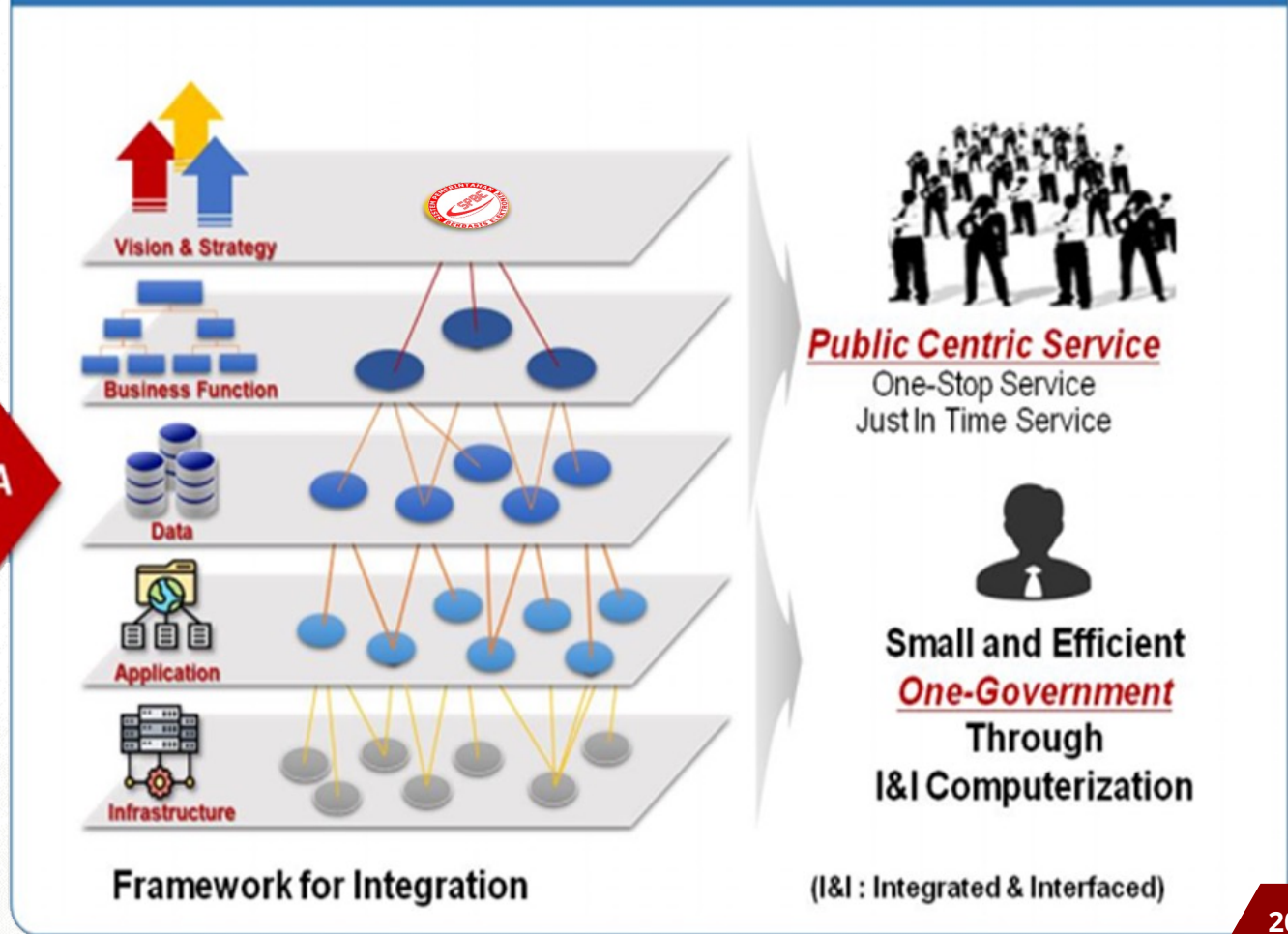
TANPA & DENGAN

# ARSITEKTUR SPBE ●●●

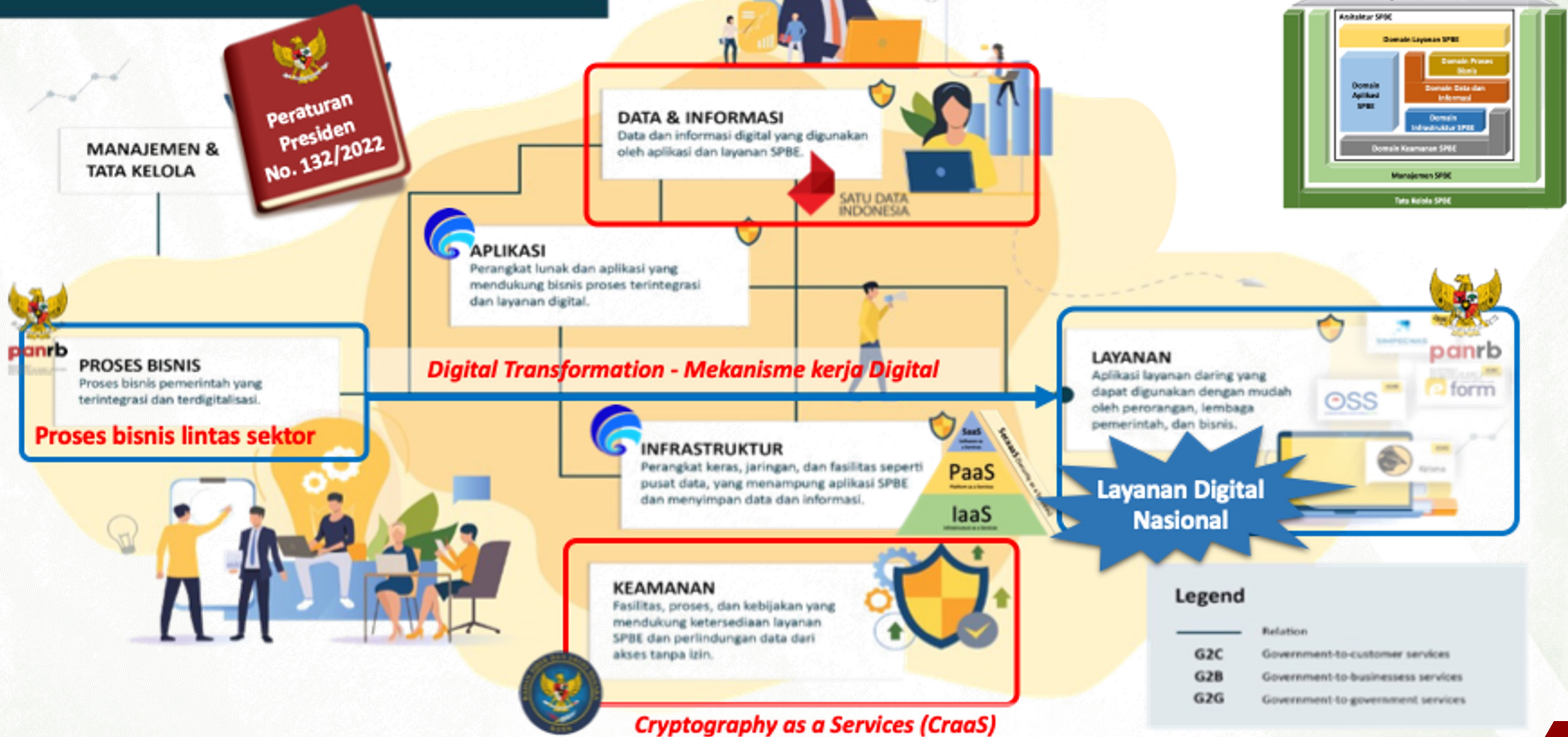
AS-IS



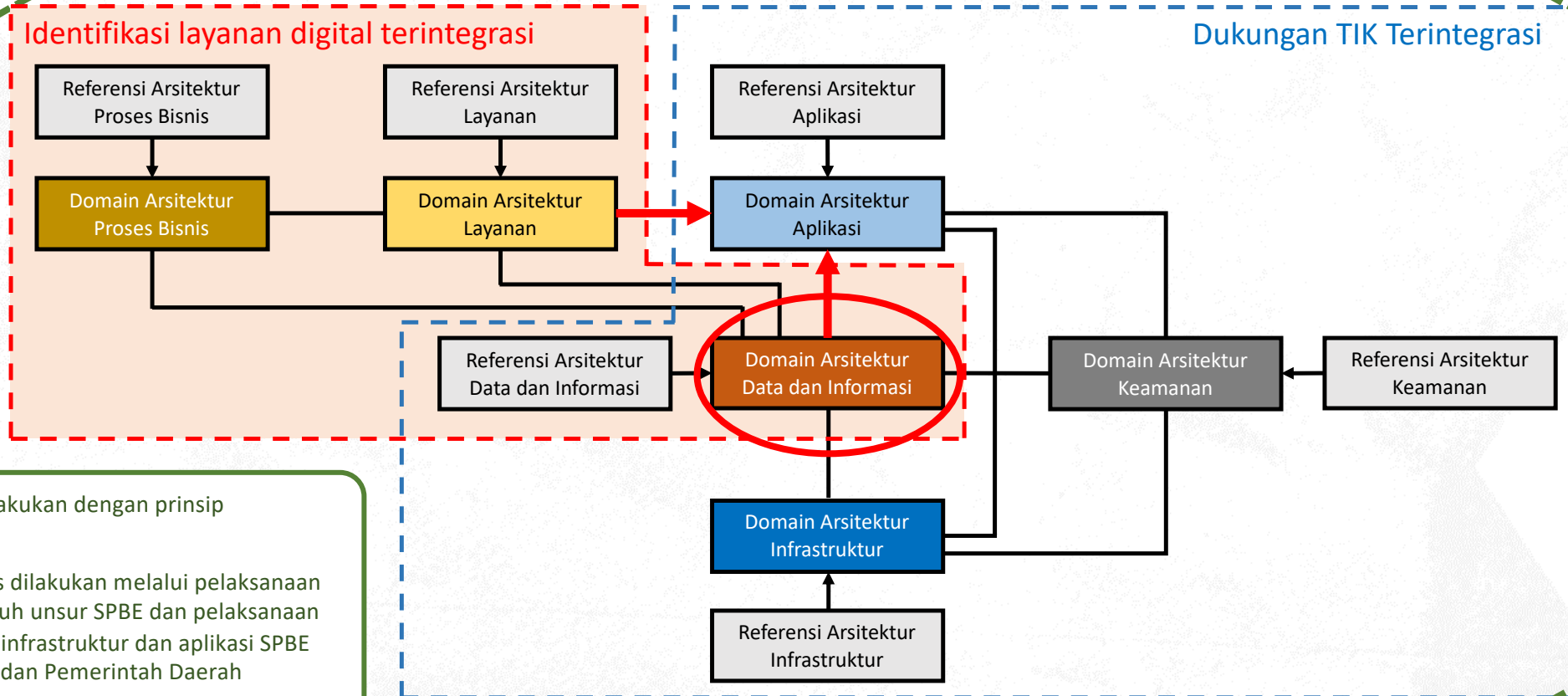
TO-BE



# ILUSTRASI KERANGKA ARSITEKTUR SPBE



# KETERKAITAN ANTAR DOMAIN DALAM KERANGKA ARSITEKTUR SPBE SERTA RELASI DENGAN PELAKSANAAN AUDIT SPBE



1. Penerapan SPBE dilakukan dengan prinsip akuntabilitas
2. Prinsip akuntabilitas dilakukan melalui pelaksanaan reviu/evaluasi seluruh unsur SPBE dan pelaksanaan Audit Internal pada infrastruktur dan aplikasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Audit SPBE memiliki relasi kuat dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**, Pasal 18 ayat 3 huruf c: “Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi”

## AUDIT SPBE



# SYARAT PENDUKUNG TERBENTUKNYA EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL

## Proses Bisnis Tematik

- penggunaan produk dalam negeri
  - Penanggulangan Kemiskinan
    - Peningkatan Investasi
    - Penanganan Inflasi

## Integrasi Layanan digital Berbagi Pakai

- Layanan Administrasi Pemerintahan
- Layanan Publik

**Agile Government**  
*Birokrasi lincah dan cepat*

## Tata Kelola Pemerintahan Digital (SPBE)



## Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan

**Keselarasan Arsitektur SPBE Nasional**

Upaya Peningkatan **Akuntabilitas dan transparansi** Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Digitalisasi

Standar Sistem dan Keamanan Informasi  
(Kualitas dan keberlangsungan layanan digital)

Interoperabilitas Aplikasi dan Teknologi Informasi  
(Sistem Informasi administrasi dan fungsi pemerintahan)

Interoperabilitas Data dan Informasi  
(Arsip Elektronik, Data Statistik, Data Spasial, Data Penduduk) – *Decision Support System*



# TRANSFORMASI DIGITAL

## LAYANAN DIGITAL NASIONAL

1. Penerapan SPBE untuk wujudkan Layanan Digital Nasional dilakukan dengan prinsip **keterpaduan dan interoperabilitas**
2. Prinsip keterpaduan dan interoperabilitas, dilakukan melalui penerapan Arsitektur SPBE (**tematik layanan yang bersifat *Citizen Centric*, berdasarkan proses bisnis lintas sektor**).
3. Aplikasi yang telah ada saat ini, diarahkan untuk dapat saling **interoperabilitas melalui *Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)***, konsolidasi data dalam **kerangka Satu Data Indonesia (SDI)**, pemanfaatan infrastruktur TIK berbagi pakai (**Pusat Data Nasional**), dan mengutamakan **pembentukan menjadi *aplikasi umum SPBE* sesuai Arsitektur SPBE**.
4. Pembangunan dan pengembangan aplikasi umum SPBE, diarahkan menjadi **platform digital yang terpadu**, melalui pembentukan ***integrated e-Services*** untuk menjadi bagian **Layanan Digital Nasional**.
5. **Penguatan Tim Koordinasi SPBE pada Instansi** untuk memastikan ***manajemen perubahan*** dalam **transformasi digital pada Instansi Pemerintah** selaras dengan target Arsitektur SPBE Nasional

**KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA**  
melalui Ekosistem Digital Nasional mendukung pencapaian Indonesia Maju 2045





**Masa depan pemerintahan digital Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dengan penerapan seluruh unsur-unsur SPBE secara terpadu yang dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah secara kolaboratif.**

Dulu mengurus persuratan lama sekali prosesnya. Sekarang saya dapat mengurus persuratan saat perjalanan dinas. Waktu mendarat, surat tersebut sudah selesai diolah dan disetujui oleh semua pihak terkait.



Senangnya... sambil sarapan bisa memperpanjang STNK, dapat salinan akte kelahiran anak secara daring, dan juga bayar PBB diaplikasi digital pemerintahan.



Sekarang ini memperpanjang izin usaha sangat efisien. Saya sudah tidak perlu ke kantor perizinan dan ketemu banyak petugas. MPP daring memudahkan proses kerja dengan layanan teknologi yang ramah.

